



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMMA MARTHA FINE SIMANJUNTAK
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 648538

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.335.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 618 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 749 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **155.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **167.850.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.108.436.567**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.766.786.567

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 2.766.786.567

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.